

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan Dan Penganggaran

Sutrisno

BAPPEDA Kabupaten Tulungagung

Efektivitas perencanaan penganggaran merupakan kunci utama sebuah perencanaan penganggaran dalam pencapaian tujuan strategis atas apa yang telah direncanakan, termasuk didalam upaya mendukung program pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah perlu melaksanakan prinsip-prinsip kebersamaan, partisipasi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan akan memberikan pengaruh pada efektivitas perencanaan penganggaran dalam program pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk; mendiskripsikan faktor-faktor yang secara dominan memberikan pengaruh pada efektifitas perencanaan penganggaran, mendiskripsikan indikator-indikator terkait dengan perencanaan penganggaran, serta mendiskripsikan kompetensi kualitas sumber daya manusia perencana pada Bappeda Kabupaten Tulungagung.

Dari sisi manfaat penelitian ini berguna untuk; 1) Bagi penulis dalam mengimplementasikan kaidah-kaidah keilmuan dalam mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisa komprehensif dan sekaligus merumuskan alternatif pemecahan permasalahan dalam bentuk saran-saran. 2) Hasil penelitian ini juga memberikan informasi yang akurat, aktual dan obyektif tentang sistim perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya sebagai dasar bagi pimpinan organisasi dalam menetapkan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang efektif. 3) Untuk tingkat pelaksana, hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam memberikan informasi terkait dengan kompetensi dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran yang efektif. 4) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat memberikan referensi yang aktual dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam pelaksanaan program pembangunan dan pencapaian hasil-hasil pembangunan yang telah ditetapkan. 5) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu referensi dan pedoman bagi peneliti-peneliti lainnya yang memfokuskan kajian analisisnya pada upaya mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dengan menggunakan metode analisa kualitatif yang memfokuskan pada teknik pengambilan data melalui suvey atas ruang lingkup penelitian, pengamatan empirik secara langsung pada obyek penelitian, serta wawancara pada pihak yang berkompeten, sehingga mampu dibangun asumsi-asumsi teknokratik yang mendasarkan pada landasan teoritis serta referensi hasil penelitian lainnya. Wawancara dilakukan kepada responden yakni personil di seluruh level manajemen perencanaan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang merupakan indikator-indikator dari variabel yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan penjelasan hasil penelitian yang telah ditunjukkan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut; 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan penganggaran dalam program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu kompetensi sumberdaya manusia, kemampuan anggaran/APBD dan dokumen-dokumen perencana lainnya, teknologi informasi sebagai alat bantu proses perencanaan serta hubungan koordinasi dan komunikasi dengan legislatif. 2) Berdasarkan indikator perencanaan dan penganggaran program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan secara tepat waktu, sistimatis, integratif, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 3) Kompetensi sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda adalah baik sehingga memberikan pengaruh yang positif terhadap efektifitas perencanaan dan penganggaran pada kabupaten Tulungagung.

Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah; 1) Perlunya pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistim perencanaan penganggaran program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 2) Tidak melakukan mutasi karyawan/ pegawai yang telah memiliki kompetensi tinggi pada sistim perencanaan dan penganggaran ke bidang lain diluar

perencanaan dan penganggaran. 3) Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Perencana agar dapat melakukan proses perencanaan penganggaran secara bertanggungjawab. 4) Membangun koordinasi dan komunikasi politik untuk menjamin terwujudnya perencanaan penganggaran yang tepat waktu dan tepat kualitas.

Abstract

The effectiveness of budgeting planning is the primary key of a budgeting plan in the achievement of strategic objectives of what has been planned, including in the effort to support regional development programs in realizing the welfare of the community. Regional development needs to implement the principles of togetherness, participation, fairness, sustainability, environmental awareness, and independence by maintaining a balance of regional progress and national unity. A systematic, focused, integrated, comprehensive, and responsive development planning will have an impact on the effectiveness of budgeting planning in regional development programs.

This study aims to describe the factors that predominantly give effect to the effectiveness of budgeting planning development programs, to describe the indicators related to budgeting planning, and also to describe competency quality of human resources planning at Bappeda of Tulungagung Regency.

From the usefulness of this research is useful for; 1) For the authors in implementing the rules of science in identifying problems, perform a comprehensive analysis and simultaneously formulate alternative solutions in the form of suggestions. 2) The results of this study also provide accurate, actual and objective information about the system of planning and budgeting that has been done as well as the dominant factors that influence it as the basis for the leadership of the organization in establishing effective planning and budgeting policies. 3) For the executing level, the results of this study can provide benefits in providing information related to the competencies and qualifications of human resources needed in effective planning and budgeting. 4) For local governments, the results of this study can provide an actual reference in order to realize the system of effective planning and budgeting in the implementation of development programs and achievement of development results that have been determined. 5) The results of this study are also expected to be one of the reference and guidance for other researchers who focus their analysis analysis efforts to realize effective planning and budgeting in the implementation of regional development programs

By using qualitative analysis method that focuses on data retrieval technique through survey on the scope of research, direct empirical observation on the object of research, as well as interviews on the competent parties, so as to build the technocratic assumptions based on theoretical foundations as well as references of other research results. Interviews were conducted to respondents ie personnel at all levels of budgeting planning management at Bappeda Tulungagung District by using some questions which are indicators of the variables.

Based on the results of research funding discussion that has been done with the explanation of research results that have been shown in the previous chapter, can be taken some conclusions as follows; 1) Factors that affect the effectiveness of budgeting planning in development programs at the Government of Tulungagung Regency are human resource competence, budget capability / APBD and other planning documents, information technology as a planning process tools, and also coordination and communication relationship with legislatif. 2) Based on indicator of budgeting planning of development program of Government of Tulungagung Regency has been executed in a timely, systematic, integrative, and in accordance with local financial capability. 3) The level of information technology budgeting planning tools give a strong influence on effectiveness of planning dan budgeting.

While the advice can be given is; 1) The need for hardware and software development in the planning system of development program budgeting at the Government of Tulungagung Regency. 2) No mutation of employees / employees who have high competence in the system of planning and budgeting to other areas outside planning and budgeting. 3) Increase the competence and integrity of HR Planner in order to carry out budget planning process responsibly. 4) Establish coordination and political communication to ensure the realization of timely and appropriate quality budget planning.

Latar Belakang Teoritis

Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menuntut setiap Pemerintah Daerah untuk siap melaksanakan perencanaan pembangunan dengan dukungan penganggaran secara efisien dan efektif.

Menurut S. Wiharno (1992) Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha

tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media perencanaan bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil.

Tesis yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan penganggaran dengan mengambil studi kasus pada Bappeda Kabupaten Tulungagung disusun dengan mempertimbangkan dalam rangka mewujudkan good governance maka transparansi pemerintahan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, salah satunya adalah terkait dengan perencanaan dan penganggaran program kegiatan pembangunan.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas sama artinya dengan keefektifan yang berarti sebagai keadaan berpengaruh; keberhasilan (tentang usaha, tindakan). Menurut kamus besar bahasa Indonesia keefektifan mempunyai arti sifat atau keadaan efektif. Efektif mempunyai arti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (Penjelasan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Perencanaan Penganggaran

Pengertian Anggaran Menurut Munandar (2001:11) defenisi anggaran adalah "suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang."

Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen (Welsch, 2000).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP dan RPJM) Nasional dan Daerah .

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya tersedia. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, demikian menurut T. Hani Handoko (2005).

Perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat/daerah terdiri dari:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Rencana pembangunan jangka panjang yang disusun oleh pemerintah pusat/daerah, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional/Daerah. RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
- b. Musyawarah perencanaan pemba- ngunan daerah.
- c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Untuk tingkat daerah, Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJP daerah. Rancangan awal RPJP yang disusun Bappeda tersebut akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah pusat/daerah, disebut rencana pembangunan jangka menengah tingkat pusat/daerah yang disingkat menjadi RPJM Nasional/RPJM Daerah. Dalam pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa: RPJM daerah merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah, dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategik pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penjelasan pasal 5 (2) tersebut menyebutkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM daerah) dalam ayat ini merupakan rencana strategik daerah (*Renstrada*).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan;
- d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

3. Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RPJP daerah. RKPD memuat isu-isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kebutuhan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal Renja SKPD
- b. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
- d. Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD ;

Sebagai langkah pertama dalam penyusunan RKPD, Kepala Bappeda membentuk tim penyusunan RKPD. Setelah Tim Penyusunan RKPD terbentuk maka selanjutnya tim bekerja untuk merumuskan

rancangan awal RKPD berdasarkan asumsi-asumsi perencanaan dan penganggaran.

Metode Penelitian

Deskripsi Obyek Penelitian

Deskripsi obyek penelitian adalah meliputi hal-hal sebagaimana berikut:

1. Obyek penelitian adalah para aparatur di BAPPEDA Kabupaten Tulungagung yang terkait dengan perencanaan mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Staf Operator aplikasi sistim perencanaan.
2. Dokumen-dokumen perencanaan penganggaran dan pembangunan untuk mendapat data dan informasi tentang indikator pembangunan yang meliputi dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA PPAS.
3. Media atau sarana prasarana penunjang proses perencanaan adalah salah satu pendukung yang mempengaruhi efektifitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan.
4. Hubungan koordinasi dan komunikasi dengan legislatif yang sinergis untuk menentukan indikator perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu.

Jenis Metode Penelitian

Evaluasi penilaian dengan metode kualitatif juga dideskripsikan untuk membuat gambaran secara obyektif, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarvariabel yang diteliti dan berkaitan dengan peristiwa atau situasi dan kondisi dalam proses perencanaan penganggaran dalam program pembangunan daerah.

Konsep dan Ruang Lingkup Operasional Penelitian

Konsep penelitian dimulai dari melakukan identifikasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang sudah ada serta regulasi peraturan yang menaungi untuk membangun korelasi dan sinergi atas materi-materi yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Setelah sumber-sumber data sekunder terkumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menentukan pihak-pihak yang akan menjadi responden untuk menggali data melalui teknik wawancara. Konsep selanjutnya adalah

melihat secara langsung perangkat sistem yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan penganggaran.

Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan operasional atas penelitian yang dilakukan yakni mencakup dokumen-dokumen yang relevan dengan substansi penelitian, kemudian pejabat struktural dan fungsional perencanaan di lingkup BAPPEDA Kabupaten Tulungagung. Kemudian batasan secara umum adalah proses perencanaan penganggaran program pembangunan yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penulisan ini meliputi variabel *dependent* (terikat) yaitu efektivitas perencanaan penganggaran. Sedangkan variabel *independent* (bebas) penelitian ini adalah kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) perencana anggaran, kemampuan keuangan daerah, dokumen-dokumen perencanaan yang terdiri dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RKPD, RPJMD dan RPJP; Hubungan koordinasi dan komunikasi dengan Legislatif.

Efektivitas Perencanaan penganggaran dalam program pembangunan akan berdampak terhadap efisiensi APBD dan ketepatan sasaran dalam upaya mewujudkan visi dan misi suatu organisasi, pada akhirnya dampak akan dirasakan oleh masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program pembangunan. Berkaitan dengan indikator aparatur, ada beberapa permasalahan dalam upaya melihat pengaruh tersebut diantaranya adalah:

- Belum adanya tolok ukur yang jelas terhadap kualitas kinerja aparatur yang terkait dengan perencanaan penganggaran program pembangunan.
- Tingkat kualifikasi aparatur dalam perencanaan penganggaran yang tidak sama
- Kompetensi aparatur dalam aplikasi sistem perencanaan penganggaran yang masih perlu ditingkatkan.

Pola Hubungan antar variabel

Pola hubungan antarvariabel adalah variabel *independent* (bebas) mengakibatkan

terjadinya variabel *dependent* (terikat), atau hubungan *causalitas* atau sebab akibat dimana suatu kondisi yang ada pada variabel *independent* mempengaruhi kondisi variabel *dependent*.

Artinya Efektivitas perencanaan penganggaran sebagai variabel *dependent* (terikat) dipengaruhi variabel-variabel *independent* (bebas), yaitu :

- Kompetensi SDM perencana.
- Kemampuan anggaran (APBD).
- Dokumen-dokumen perencanaan.
- Hubungan koordinasi dan komunikasi dengan Legislatif.

Pertanyaan Penelitian/ Pengkajian

Pertanyaan penelitian/pengkajian untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan penelitian:

- Apakah sistim dan mekanisme perencanaan penganggaran program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya?
- Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap efektifitas perencanaan penganggaran program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung?
- Bagaimanakah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan penganggaran?
- Apakah sistim dan alat bantu dalam proses perencanaan penganggaran memberi pengaruh besar pada efektifitas perencanaan penganggaran program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung?
- Indikator apakah yang dipakai dalam mengukur efektifitas perencanaan penganggaran program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung?
- Apakah indikator-indikator tersebut dapat memberikan pengaruh secara spesifik pada perencanaan penganggaran?
- Adakah permasalahan perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi dan bagaimanakah solusinya?
- Bagaimanakah hubungan koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif ?.

Asumsi Penelitian

Asumsi yang dapat diterangkan dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur, kemampuan anggaran/APBD, dokumen-dokumen perencanaan, hubungan koordinasi dan komunikasi dengan legislatif, akan memberikan pengaruh yang positif dalam perencanaan penganggaran, apabila masing-masing komponen tersebut sesuai dengan visi, misi, dan sasaran organisasi. Salah satu komponen terpenting adalah tingkat kompetensi aparatur, semakin kompeten aparatur dalam merencanakan anggaran, akan semakin efektif perencanaan yang dilakukan. Salah satu aspek untuk meningkatkan kompetensi aparatur tersebut adalah melalui diklat yang bertujuan untuk peningkatan kinerja aparatur.

Kriteria Evaluasi Penilaian Metode Kualitatif

Evaluasi penilaian dengan metode kualitatif didasarkan dari hasil analisis referensi-referensi dalam bentuk kepustakaan, literatur, peraturan, *web site* atau sumber kepustakaan lain terkait dengan perencanaan penganggaran pembangunan daerah. Sumber pustaka tersebut dihubungkan dengan kajian deskriptif kualitatif peneliti melalui pengamatan kondisi sebenarnya di lapangan yang dikuatkan dengan data-data yang ada.

Hasil Penelitian.

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung terdiri dari Kepala Badan yang membawahi Sekretaris, Bidang Infrastruktur Prasarana Wilayah, Bidang Ekonomi, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan beserta sub bidang yang ada dilingkup masing-masing bidang tersebut.

Faktor-Faktor Dalam Perencanaan Penganggaran

Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi proses perencanaan dan bahkan dapat menentukan hasil dari proses perencanaan dan penganggaran tersebut. Kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur perencanaan, kemampuan keuangan

daerah, dokumen-dokumen perencanaan lain, sistim atau media penunjang proses perencanaan dan penganggaran, hubungan koordinasi dan komunikasi dengan legislatif.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur

Kompetensi sumber daya aparatur memiliki pengaruh yang kuat pada pembentukan kinerja dan kualitas hasil perencanaan dan penganggaran.

Untuk itu dapat dirumuskan beberapa syarat kompetensi aparatur yang dapat diidentifikasi bermanfaat dalam mendukung pencapaian kinerja ideal proses perencanaan dan penganggaran. Syarat kompetensi tersebut dapat dalam bentuk ketrampilan, sikap, perilaku dan tanggungjawab moral (attitude) sebagaimana berikut:

- Aparatur perencanaan harus mampu melihat obyektif dan terukur terhadap kebutuhan program pembangunan dan kebutuhan anggaran ideal untuk merealisasikan.
- Aparatur perencanaan dan penganggaran harus mempunyai kemampuan dalam merumuskan dasar-dasar aturan dan regulasi yang terkait dengan program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
- Aparatur perencanaan dalam tingkatan manajerial harus memiliki kemampuan membangun komunikasi politik dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya.
- Aparatur perencanaan ditingkat pelaksana dan operator harus memiliki kompetensi dalam operasional sistim aplikasi dan pengembangan mekanisme perencanaan penganggaran berbasis *online*.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah identik dengan kapasitas belanja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Kemampuan keuangan tersebut juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Hal ini dikarenakan kedua komponen tersebut memberikan pengaruh pada aktifitas ekonomi masyarakat untuk menghasilkan pendapatan, serta inflasi berpengaruh pada kapasitas daya beli yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen perencanaan yang terkait dengan proses perencanaan program pembangunan dan mekanisme penganggaran adalah dokumen perencanaan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan. Dokumen-dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu dan lainnya, termasuk dokumen-dokumen tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sinergitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan di semua level pemerintahan tersebut sangat diperlukan karena semua program pembangunan tersebut bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Media dan Sarana Penunjang Proses Perencanaan Penganggaran (Teknologi Informasi)

Sarana prasarana ataupun media yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan penganggaran. Ketersediaan sarana prasarana penunjang dan media untuk melaksanakan proses perencanaan penganggaran memberikan kontribusi pada efisiensi penggunaan waktu, konsistensi materi perencanaan dan kemudahan dalam membangun sistem informasi program pembangunan yang akurat.

Hubungan Koordinasi dan Komunikasi dengan Legislatif

Dalam sistem pemerintahan terdapat kewenangan DPRD selaku legislatif dalam menetapkan APBD kabupaten. Untuk itu koordinasi dan komunikasi yang efektif pada saat merumuskan, melakukan pembahasan dan hingga penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran sangat diperlukan untuk pencapaian indikator-indikator efektifitas perencanaan penganggaran terutama terkait dengan ketepatan waktu penetapan APBD.

Indikator Perencanaan Penganggaran Pembangunan

Indikator perencanaan penganggaran program pembangunan adalah parameter-parameter yang digunakan dalam mengukur kinerja perencanaan dan penganggaran. Parameter tersebut merupakan kondisi yang harus ada dan diwujudkan manakala ada keinginan untuk mewujudkan perencanaan yang efektif. Indikator

perencanaan penganggaran yang harus ada adalah sebagaimana *berikut*:

Tepat Waktu

Indikator perencanaan yang pertama adalah tepat waktu. Ketepatan waktu dalam proses perencanaan sangat penting untuk menjamin materi yang dituangkan dalam perencanaan dapat terwujud dalam rentang waktu yang telah ditentukan dengan standar kualitas yang telah ditentukan pula.

Sistimatis

Sebuah kaidah perencanaan penganggaran harus dilakukan secara sistimatis menurut hirarki yang ada. Sistimatis di aplikasikan dalam proses perencanaan dalam bentuk tahapan perencanaan dan output yang harus dihasilkan dalam setiap tahapan, juga dalam hal pelaporan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan tahapan perencanaan penganggaran berikutnya.

Integratif

Materi dalam perencanaan penganggaran disusun berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan program pembangunan dan kapasitas penganggaran ideal, yang dapat berasal dari usulan masyarakat secara berjenjang, jaring aspirasi masyarakat melalui legislatif (bottom up), serta hasil koordinasi secara vertikal dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (top down).

Kaidah indikator perencanaan yang mengintegrasikan materi perencanaan penganggaran dari bawah dan dari atas ini diharapkan mampu mewujudkan program pembangunan yang efektif untuk pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah adalah sebuah kondisi normatif dalam setiap perencanaan penganggaran di daerah. Kapasitas perencanaan penganggaran program pembangunan di daerah akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan yang dimiliki daerah untuk membiayai kebutuhan program pembangunan tersebut. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menyebabkan terjadinya proses penyusunan skala prioritas menurut urgensi, manfaat, dan sinergitas.

Hasil Pembahasan

Pembahasan ini lebih bersifat deskriptif dengan memberikan narasi atas

gambaran riil dan hasil interpretasi seluruh dokumen-dokumen yang ada dalam proses identifikasi variabel dan indikator variabel dalam penelitian ini. Uraian yang merupakan hasil analisa komprehensif berdasarkan landasan teoritis yang relevan serta dengan melihat secara langsung hasil proses perencanaan penganggaran disajikan secara kronologis menurut kaidah induktif.

Penalaran induktif dimulai dari pengamatan secara langsung dan obyektif (pengamatan empirik) secara khusus pada masing-masing dokumen yang dihasilkan dalam setiap tahapan perencanaan untuk kemudian disimpulkan sebagai satu rangkaian sistim yang dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi yang efektif atau tidak efektif.

Kinerja Faktor-Faktor Perencanaan Penganggaran

Kinerja faktor-faktor perencanaan dan penganggaran program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana, Kemampuan keuangan daerah, dan dokumen hasil perencanaan telah dapat diidentifikasi melalui pengamatan empirik secara langsung dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk selanjutnya dilakukan komparasi atas nilai-nilai atau parameter-parameter efektifitas menurut beberapa referensi kepustakaan ataupun hasil penelitian terdahulu, serta hubungan koordinasi dan komunikasi dengan legislatif.

- a. Sumber daya manusia (SDM) perencana yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menunjukkan kompetensi yang baik untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif.
- b. Kemampuan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Tulungagung cukup moderat dengan tingkat PAD yang tidak terlampaui besar sehingga kebijakan program pembangunan banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat.
- c. Media dan sarana prasarana penunjang perencanaan berbasis teknologi informatika pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat

berbagai kendala dan permasalahan terkait konektivitas jaringan dan keterbatasan kemampuan *up grading* perangkat keras yang ada.

- d. Hubungan koordinasi dan komunikasi dengan legislatif adalah juga salah satu faktor yang ikut menentukan tingkat efektifitas perencanaan penganggaran. Hal ini dikarenakan penetapan dokumen ini dalam bentuk Perda dilakukan oleh DPRD.

Capaian Indikator

Perencanaan Penganggaran

Pencapaian indikator perencanaan penganggaran program pembangunan adalah ketercapaian parameter-parameter yang digunakan dalam mengukur kinerja perencanaan penganggaran. Capaian indikator perencanaan penganggaran berdasarkan pengamatan empirik secara langsung, wawancara pihak berkompeten serta observasi atas bekerjanya sistim dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. Tepat waktu, capaian indikator perencanaan yang pertama terkait dengan ketepatan waktu setiap tahapan proses perencanaan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan dengan baik.
- b. Sistimatis adalah sebuah kaidah perencanaan penganggaran harus dilakukan secara sistimatis menurut hirarki yang ada. Ukuran sistimatis telah ditetapkan melalui peraturan yang ada. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- c. Materi dalam perencanaan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah disusun berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan program pembangunan dan kapasitas penganggaran ideal dalam mekanisme usulan masyarakat secara berjenjang, jaring aspirasi masyarakat melalui legislatif (*bottom up*), serta hasil koordinasi secara vertikal dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (*top down*).
- d. Perencanaan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah disusun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, karena bagaimanapun

kapasitas perencanaan penganggaran program pembangunan di daerah akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan yang dimiliki daerah untuk membiayai kebutuhan program pembangunan tersebut.

Pengaruh Kinerja Faktor – Faktor Perencanaan Penganggaran Terhadap Capaian Indikator Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan secara komprehensif mendapati kenyataan bahwa faktor-faktor dalam efektifitas perencanaan pembangunan memberikan pengaruh yang signifikan dan luas pada capaian indikator perencanaan penganggaran. SDM perencana, kemampuan keuangan daerah, dan dokumen perencanaan lainnya, serta hubungan koordinasi dan komunikasi dengan Legislatif, telah mampu mempengaruhi terbentuknya efektifitas perencanaan dan penganggaran.

SDM yang berkualitas dan integritas tinggi yang didukung oleh perangkat media teknologi informatika yang memadai dapat mendorong terwujudnya perencanaan penganggaran tepat waktu, sistimatis, material perencanaan yang lengkap dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pengembangan sistim informasi perencanaan dan penganggaran yang signifikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan mekanisme kerja dan regulasi yang ada, serta hubungan koordinasi dan komunikasi dengan Legislatif dapat dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan efektifitas perencanaan penganggaran program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Konteks Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa secara komprehensif terhadap seluruh indikator variabel maka didapatkan jawaban atas hasil penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi dan kualitas SDM perencana, regulasi dan aturan yang berlaku, media dan sarana prasarana yang digunakan serta kemampuan keuangan daerah, serta hubungan koordinasi dan komunikasi dengan legislatif memberikan pengaruh luas terhadap efektifitas perencanaan penganggaran, mendapati dan menyimpulkan bahwa faktor-faktor sebagaimana tersebut diatas terbukti signifikan dan sangat

menyakinkan telah memberikan dampak terhadap efektifitas perencanaan penganggaran program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan penjelasan hasil penelitian yang telah ditunjukkan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan penganggaran dalam program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu kompetensi sumberdaya manusia, kemampuan anggaran/APBD, dan dokumen-dokumen perencanaan serta hubungan koordinasi dan komunikasi dengan Legislatif.
2. Berdasarkan indikator perencanaan penganggaran program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan secara tepat waktu, sistimatis, inklusif, lengkap, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Kompetensi sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Bappeda adalah baik sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap efektifitas perencanaan dan penganggaran pada kabupaten Tulungagung.

Saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi BAPPEDA Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistim perencanaan penganggaran program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Tidak melakukan mutasi karyawan/pegawai yang telah memiliki kompetensi tinggi pada sistim perencanaan dan penganggaran ke bidang lain diluar perencanaan dan penganggaran.
3. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Perencana agar dapat melakukan proses perencanaan penganggaran secara bertanggungjawab.
4. Membangun koordinasi dan komunikasi politik dengan Legislatif untuk menjamin

terwujudnya perencanaan penganggaran yang tepat waktu dan tepat kualitas.

Daftar Pustaka

- Aktarina (2015) *Pengaruh Karakteristik Individu, Pekerjaan Dan Efektivitas perencanaan penganggaran Terhadap Motivasi Dan Dampaknya Terhadap Program pembangunan daerah Anggota Polri Di Polresta Palembang*, STIE Mulya Darma Pratama Palembang
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. 2011. *Modul 1 Perencanaan dan Penyusunan APBD. Training of Trainers (TOT) Diklat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Financial Management for Non-Finance Officer)*.
- Handoko, T. Hani. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Hardjana, Agus. 2001. *Training Sumber Daya Manusia Yang Efektif*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Kemala (2016) *Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan Dan Karakteristik Organisasi Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai*, Jurnal Benefita Vol 1 No 1 Tahun 2016
- Lubis (2012) *Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, Iklim Organisasi terhadap Kepuasan dan Program pembangunan daerah Karyawan*, Trikonomika Volume 11, No. 2, Desember 2012, Hal. 212–228 ISSN 1411-514X
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Pertama. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Manulang, M, 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munandar, M , 2001, “*Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*”, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta
- Mulyadi, 2001, “*Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*”, Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta
- Munandar, M. 2001. *Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta.
- Nafarin, M, 2000, “*Penganggaran Perusahaan*”, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta
- Narumondang Bulan Siregar, 2003, “*Penyusunan Anggaran Perusahaan Sebagai Alat Manajemen Dalam Pencapaian Tujuan*”, Aksara Baru, Jakarta
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 151.
- Robbins, Stephen P, dan Mary Coulter, (2010) “*Manajemen*”, Ed 10, Jakarta: Erlangga.
- Setiawan (2013) *Pengaruh Karakteristik Individu Dan Efektivitas perencanaan penganggaran Terhadap Program pembangunan daerah Karyawan Pada PT.Awetama Bina Reksa*, Jurnal AKMENBIS Akademi Akuntansi Permata Harapan Vol II, No 01 ISSN: 2302-6847. Hal. 55-70 Maret 2013
- Simamora, H, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Sofyan Safri Harahap, 2004, “*Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*”, Edisi Pertama, Cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suprihanto, John, 2003. *Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan*. Edisi Pertama, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Swasto, Bambang. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, FIA-Unibraw, Malang.
- Umar, Husein. 2000. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Wecsh Glenn A (2000) “*Anggaran Perencanaan dan pengendalian*”, penerjemah Anas Sidik, Salemba Empat, Jakarta.

Yanuarisky (2014) *Analisis Efektivitas perencanaan penganggaran dan Karakteristik Individu Terhadap Program pembangunan daerah Karyawan di Perusahaan Aneka Food Kopkar Sekar Jember*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun 2014.